

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya)**



Disusun Oleh

**SUSANTI
NIM. 180604005**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Susanti
NIM : 180604005
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

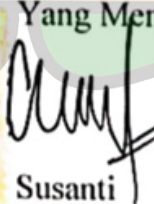
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R Banda Aceh, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan,




Susanti

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi
Dengan Judul:**

**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap
Pemberdayaan Masyarakat
(Studi pada Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

Disusun Oleh:

Susanti
NIM. 180604005

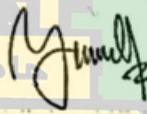
**Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Pembimbing I



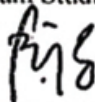
Dr. Hafas Furgani, M.Sc. R - R A N I
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II



Yulindawati, SE., MM.
NIP. 197907132014112002

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi**



Cut Dian Putri, SE., M.Si, AK.
NIP. 198307092014032

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam
Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

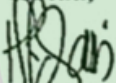
Susanti
NIM. 180604005

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M.Sc.
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,



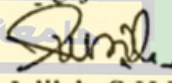
Yulindawati, SE., MM.
NIP. 197907132014112002

Penguji I,



Dr. Fithriady, Lc., M.A.
NIP. 1980081220060410004

Penguji II,



Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2008068803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M.Sc
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Susanti
NIM : 180604005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 180604005@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
(Studi pada Desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Penulis

Susanti
NIM. 180604005

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Ekonomi.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapat banyak saran, dorongan, bimbingan dari berbagai pihak yang lebih berpengalaman, oleh karena itu tanpa menghilangkan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.EC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang penulis butuh selama ini.
3. Ibu Cut Dian fitri, SE., M.Si., AK selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ibu Ana Fitria, M.Sc.. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Hafis Maulana, SP., S.Hi., selaku ketua Laboraturium dan Ibu Uliya Azra, SE.,M.Si selaku wakil ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.EC sebagai Dosen Pembimbing 1 yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. IbuYulindawati, SE.,MM sebagai Dosen Pembimbing 2 yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Cut Elfida, S.H.I.,M.A sebagai Penasehat Akademik dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat dan seluruh masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya karena telah membantu dalam penelitian saya.
9. Orang tua tercinta, Bapak Efendi dan Ibunda Elly Novida terimakasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, percayaan, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Ekonomi. Terimakasih juga kepada Juliandry Erista selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis, semoga kita dapat membanggakan orang tua.
10. Terima kasih kepada Rossa Yuli Fitri Maulinda, kak Rossi Ayuningtia, Nurul Yusra, Tri Raina Mutiara selaku sahabat sehidup tapi tak semati, terimakasih atas berbagai pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis, terimakasih atas segala semangat, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Dan terima kasih kepada Fakhrul Razi, Safrijal, selaku sahabat yang selalu ada dikala susah dan senang, yang selalu memberi semangat sedari tahun 2018 hingga saat ini. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian. Semoga kita bisa sukses dan selalu bersama hingga akhir hayat. Aamiin. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi angkatan 2018 yang sangat

sering membantu dalam banyak hal terimakasih atas segalanya.
Semoga kesuksesan segera menghampiri kita.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna tapi penulis sangat berharap proposal ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Penulis,

Susanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. **Maddah** A R - R A N I R Y

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي / ٓ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Susanti
NIM : 180604035
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Ilmu
Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi
pada Desa Panton Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya)
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
Pembimbing II : Yulindawati, SE., MM.

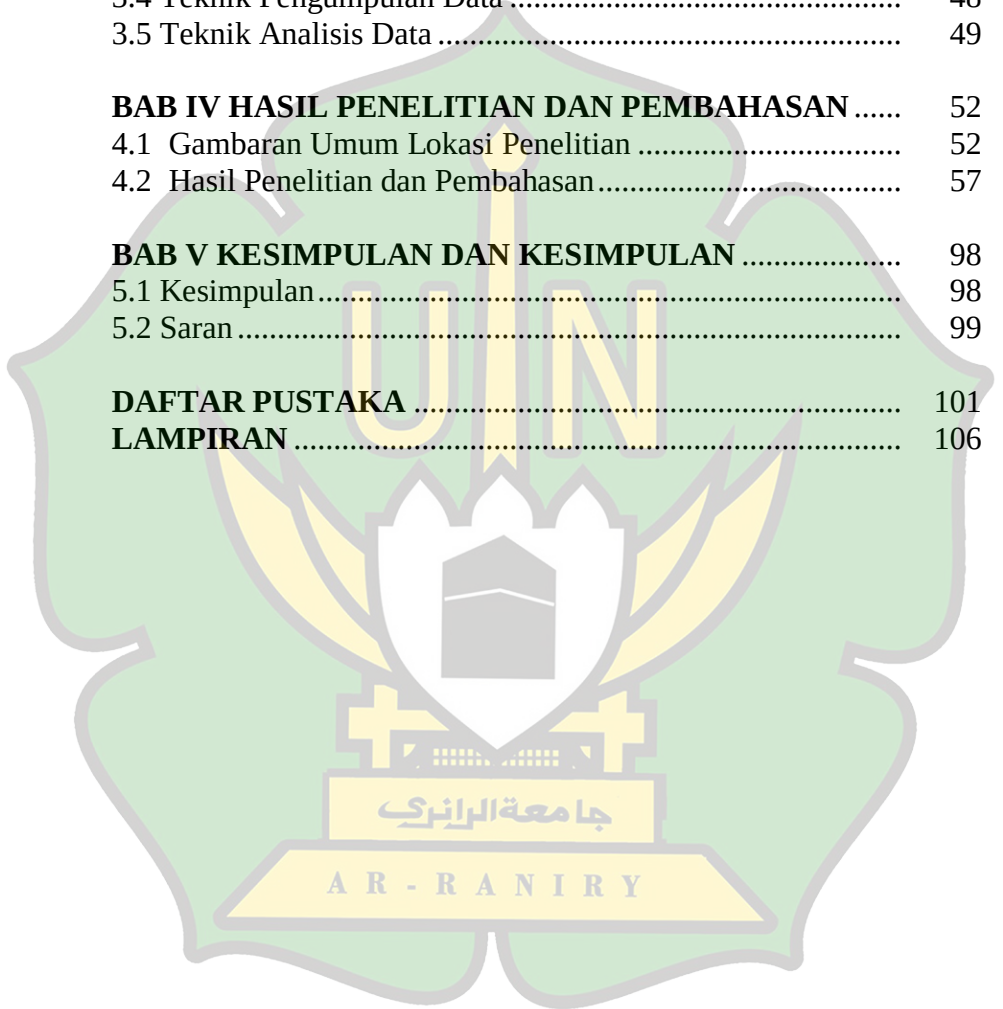
Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk dana desa yang telah ditetapkan sebagai sumber dana yang dapat memberdayakan masyarakat di suatu desa, dengan segala aspek penting yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, faktor pendukung, dan penghambat alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dilihat dari berbagai pembangunan yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat seperti memberikan modal usaha pada UKM, penanaman pangan, menyediakan pembibitan jagung, pembagian sapi dan tempat pembibitan sayuran. Faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat tersedianya lahan dalam bercocok tanam, memberikan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kurang ketersediaan SDM, minimnya pengetahuan, sulit memasarkan produk serta sering terjadinya banjir dalam kegiatan bercocok tanam.

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa & Pemberdayaan Masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Alokasi Dana Desa	13
2.1.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	13
2.1.2 Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa	19
2.1.3 Manfaat Alokasi Dana Desa.....	21
2.2 Pemberdayaan Masyarakat	22
2.2.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	22
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	24
2.2.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat	28
2.2.4 Falsafah Pemberdayaan Masyarakat	31
2.2.5 Strategi Pemberdayaan	34
2.2.6 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat ...	35
2.3 Temuan Penelitian Terkait.....	37
2.4 Kerangka Penelitian.....	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Rancangan Penelitian	45
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	46
3.3 Informan Penelitian	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN KESIMPULAN	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui ADD di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2019	3
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	37
Tabel 3.1 Informan Penelitian	47
Tabel 4.1 Urutan Sejarah Kepemimpinan Pemerintah Gampong Panton.....	54
Tabel 4.2 Sejarah Pembangunan Gampong Panton.....	54
Tabel 4.3 Informan Penelitian	58
Tabel 4.4 Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	59
Tabel 4.5 Dana Desa dan Pemberdayaan	78
Tabel 4.6 Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat	88
Tabel 4.7 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Rata-Rata APBG Tahun 2020-2022.....	8
Gambar 2.1 Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah dan Desa.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	43
Gambar 3.1 Triangulasi Data.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Tahun Akademik 2022/2023	106
Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh	107
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kechik Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya	108
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	109
Lampiran 5 Daftar Nama-Nama yang Diteliti	111
Lampiran 6 Foto Dokumentasi	112
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Penulis	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang pernah ada dan berkembang sejalan dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan struktur masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan desa maka pihak pemerintah menentukan sumber pendapatan dana desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu sumber pendapatan dana desa yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui ADD. Menurut Raharjo (2020:7) ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota, yakni paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBN setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi Kab/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Ketersediaan ADD merupakan salah satu donasi stimulan atau dana perangsang buat memajukan acara pembangunan pemerintah desa yang disupport dengan keikutsertaan swadaya gotong royong masyarakat dalam melakukan aktivitas pemerintahan serta pemberdayaan rakyat (Rorong dkk, 2021). Pada dasarnya ADD tidak hanya terfokus pada pembangunan

infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata (Amsyal dkk, 2020). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Program-program pemberdayaan masyarakat desa dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah upaya dengan macam kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara (Minang dkk, 2021). Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat penting karena bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diutamakan, karena tujuan adanya dana desa untuk mensejahterakan masyarakat, baik pada bidang ekonomi, sosial,

maupun infrastruktur. ADD ini merupakan salah satu bentuk dana desa yang telah ditetapkan sebagai sumber dana yang dapat memberdayakan masyarakat di suatu desa, dengan segala aspek penting yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut. ADD ini perlu dikembangkan, karena menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat untuk mensejahterakan kehidupannya.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Salah satunya pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Sumber dana untuk menjalankan program-program pemberdayaan tersebut berasal dari alokasi dana desa. Adapun beberapa program yang sudah berjalan sejak tahun 2020 sampai 2022 dengan tujuan sebagai pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui ADD di Desa Panton,
Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2022

No	Program	Penerima Manfaat	Biaya	Sumber Dana	Tahun
1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Rp 9.300.000,00	ADD	2021
2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan &	Masyarakat	Rp 33.200.000,00	ADD	2021

No	Program	Penerima Manfaat	Biaya	Sumber Dana	Tahun
	Kebudayaan (Insentif Pengajar Paud)				
3	Pengelolaan Usaha Jasa & Industri Kecil	Masyarakat	Rp 83.757.109,07	ADD	2021
4	Pendirian dan Pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama	Masyarakat	Rp 136.500.000,00	ADD	2021
5	Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana serta Kejadian luar biasa lainnya	Masyarakat	Rp 16.000.000,00	ADD	2021
6	Penguatan Tata Kelola Gampong Yang Demokratis	Masyarakat	Rp 25.000.000,00	ADD	2021
7	Pembangunan Tugu Batas Desa	Masyarakat	Rp 16.014.589,64	ADD	2021
8	Pembangunan Gudang Aset	Masyarakat	Rp 94.681.934,55	ADD	2021
9	Rehab Toko Desa		Rp 173.136.917,71	ADD	2021
10	Pembangunan Toko Desa	Masyarakat	Rp 135.911.940,89	ADD	2021

No	Program	Penerima Manfaat	Biaya	Sumber Dana	Tahun
11	Pembangunan Septick Tank, Kanopi , Sumur Bor Toko Desa	Masyarakat	Rp 56.195.422,14	ADD	2021
12	Rehab Meunasah	Masyarakat	RP 9.000.000,00	ADD	2022
13	Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton		Rp 30.000.000,00	ADD	2022
14	Lanjutan Pembangunan Saluran Tanah	Masyarakat	Rp 10.000.000,00	ADD	2022
15	Pengadaan Hand Traktor	Masyarakat	Rp 60.000.000,00	ADD	2021
16	Pengadaan Mesin Perontok Padi	Masyarakat	Rp 16.500.000,00	ADD	2022
17	Pengadaan Meja Makan Kanduri		Rp 10.200.000,00	ADD	2022
18	Pengadaan Pentas Bongkar Pasang	Masyarakat	Rp 20.000.000,00	ADD	2020-2022
19	Pengadaan Becak Gampong	Masyarakat	Rp 50.000.000,00	ADD	2021-2022
20	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	Masyarakat	Rp 50.000.000,00	ADD	2021-2022
21	Optimalisasi Lahan Persawahan	Masyarakat	Rp 100.000.000,00	ADD	2022
22	Penyuluhan Pertanian	Masyarakat	Rp 10.000.000,00	ADD	2022

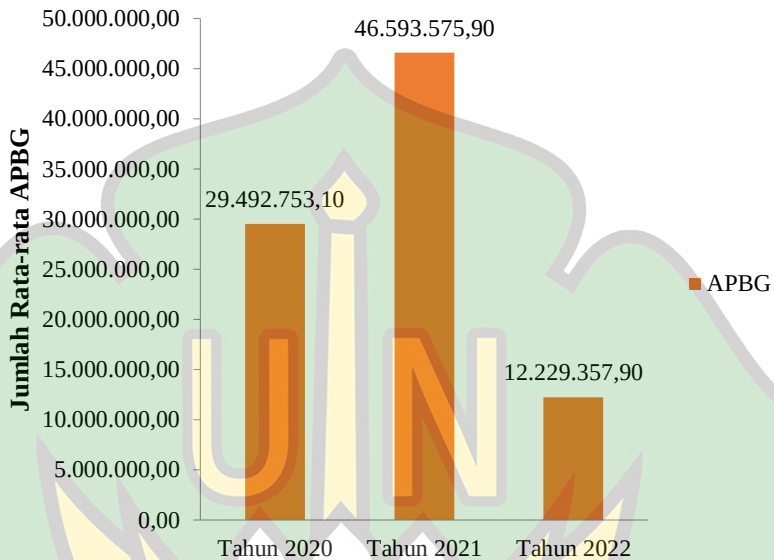
No	Program	Penerima Manfaat	Biaya	Sumber Dana	Tahun
23	Pembangunan Kilang Padi	Masyarakat	Rp 150.000.000,00	ADD	2022
24	Pengadaan Bibit Bebek Ternak	Masyarakat	Rp 30.000.000,00	ADD	2021-2022
25	Pengadaan Ternak Sapi BUMG	Masyarakat	Rp 50.000.000,00	ADD	2020-2022
26	Pengemuka n Sapi Ternak BUMG	Masyarakat	Rp 20.000.000,00	ADD	2020-2022
27	Pengadaan Alat Permainan PAUD	Masyarakat	Rp 20.000.000,00	ADD	2021-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panton (2020-2022)

Tabel 1.1 menunjukkan hasil pengelolaan ADD sejak tahun 2017-2019 baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Tujuan pengelolaan ADD tersebut sebagai program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat juga menunjukkan bahwa program-program yang telah dibentuk oleh aparat desa sudah 80% mampu memberdayakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dapat memudahkan masyarakat seperti pengadaan pembangunan, pengadaan program kesehatan maupun penyuluhan-penyuluhan pada bidang pertanian dan sebagainya.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di desa Panon terjadi kenaikan dan penurunan selama tiga

tahun terakhir. Adapun jumlah APBG selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1 Jumlah Rata-Rata APBG Tahun 2020-2022

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah rata-rata APBG Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil pengamatan membuktikan bahwa APBG selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan. Hasil pengamatan jumlah APBG tertinggi yaitu pada tahun 2021 dengan total Rp 46.593.575,90. Dana APBG merupakan keseluruhan pengeluaran dana desa dalam setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa di Desa Pantan pemberdayaan masyarakat sudah dirasakan masyarakat namun terjadi perubahan jumlah dana desa setiap tahunnya.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Helwani & Herlina (2022) bahwa pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peruntukannya.

Perencanaan ADD dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Pengorganisasian ADD dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pengawasan dalam pelaksanaan ADD dilakukan dengan pengawasan secara fungsional, pengawasan secara melekat, dan pengawasan secara structural. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumberdaya manusia terutama masih rendahnya SDM penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mampu dalam proses pengelolaan ADD. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

Hasil penelitian lainnya yang dikemukakan oleh Rudiarta dkk (2020) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan secara merata dan berkeadilan berdasarkan asas partisipatif dibawah pemerintahannya.

Berdasarkan asas otonomi daerah bahwa desa berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Maka demi mewujudkan pemerintahan desa yang adil, makmur dan sejahtera pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kegunaan sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa melalui pengelolaan dana desa dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada, menunjukkan alokasi dana desa Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu desa yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah ditunjukkan sebelumnya berkaitan dengan beberapa program yang telah terealisasi, sehingga untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan yang dirasakan masyarakat, maka peneliti memilih desa ini sebagai salah satu lokasi penelitian untuk menemukan fakta yang ada.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti akan mengulas lebih lanjut terkait dengan bank syariah yang akan disajikan dalam proposal skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
3. Apa saja faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperluas pandangan peneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini penggunaan dana desa dapat meningkatkan pemberdayaan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti sendiri tentang berbagai macam pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, dimana tidak hanya pada bidang pembangunan namun dalam bidang kesehatan maupun program-program lainnya.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat desa setempat dan masyarakat lainnya, agar kedepannya dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari segala bidang apapun.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 bab yaitu:

- BAB I : Merupakan pendahuluan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Membahas tentang konsep pengelolaan, dana alokasi desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- BAB III : Metode penelitian, yang menguraikan tentang rancangan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil dan pembahasan penelitian, yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang; (a) pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya; (b) Faktor pendukung dan penghambat dari alokasi dana desa terhadap pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
- BAB V : Penutup, kegiatan penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian memberikan saran sebagai bahan masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Alokasi Dana Desa

2.1.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan berasal dari kata manajemen yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan untuk menjalankan roda suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan suatu upaya yang sistematis dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Hamid dkk, 2021:4).

Pengelolaan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu (Putra, 2021). Pengelolaan merupakan pengertian sempit dari Manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur (Noviyanti & Mulyana, 2018). Menurut George R. Terry, pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.

Istilah “dana desa” sebenarnya tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang Desa ini terkait (dimaksudkan) dengan istilah dana desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Kemudian dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa telah diatur dalam peraturan pemerintah (Raharjo, 2020:13).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa mempunyai sumber pendapat berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa dipenuhi melalui relokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa.

Besaran dana desa yang telah ditetapkan APBN dialokasikan ke desa dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kelemahan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan (Raharjo, 2020:15).

Terkait dengan ketentuan penyaluran Dana Desa telah diatur bahwa, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN ke RKUD. Selanjutnya, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Adapun alurnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini (Raharjo, 2020:16).

Gambar 2.1

Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah dan Desa



Prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa ditujukan untuk pembangunan sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, mewujudkan lumbung ekonomi desa, dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya (Ritonga, dkk, 2021).

Selanjutnya alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Karimah dkk, 2014). Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program jangka pendek dan jangka panjang desa, seperti pembangunan jalan ke perkampungan untuk jangka pendek dan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang (Anggara, 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa

sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut (Magal dkk, 2021).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa: “Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)”. Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proporsional.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk

desa, yang bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk mendukung semua sektor dalam masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan (Samadara dkk, 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan segala sesuatu yang bersifat beruntun atau sistematis, karena dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai target atau sasaran yang diharapkan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan alokasi dana desa merupakan suatu bentuk perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk menunjang program-program jangka pendek dan jangka panjang di desa tersebut.

2.1.2. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Setiawan dkk, 2018).

Untuk memaksimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka Alokasi Dana Desa memiliki tujuan antara lain (Firman dkk, 2014):

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah Alokasi Dana Desa.
2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Aljannah (2017) tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

2.1.3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Firman dkk (2014) manfaat Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya Alokasi Dana Desa, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. Alokasi Dana Desa dapat melatih masyarakat dan pemerintahan desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan

antarpemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.

7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah merupakan pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke tingkat di bawahnya. Pendapat tersebut beranggapan bahwa peranan masyarakat dan swasta dalam sebuah pembangunan di suatu daerah adalah sangat penting dan merupakan faktor yang harus dicermati dengan jelas (Sari dkk, 2015).

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah ini merupakan masalah pembangunan yang multidimensional (Margayaningsih, 2016). Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan

Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya (Kehik, 2017).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya (Maryani & Nainggolan, 2019:9).

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Hamid, 2018:10).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu dengan tujuan sebagai upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan di wilayah

tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami (Hamid, 2018:12).

Menurut Mardikanto (2015) dalam Maryani & Nainggolan (2019:10) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan. Lembaga yang baik mempunyai visi,

misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah.

2. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan seluruh anggota yang bersangkutan.

3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki

pendidikan tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau factor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan social” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, yaitu (Sofinisa dkk, 2020):

1. Perbaikan pendidikan; perbaikan pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerimaan manfaat. Tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan

yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas; perbaikan aksesibilitas utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan; perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan; dengan perbaikan tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Perbaikan usaha; perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan; perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
7. Perbaikan lingkungan; perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan; tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaiki masyarakat; keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.2.3. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat ada lima macam, yaitu (Ulumiyah dkk, 2013):

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip diantaranya (Maryani & Nainggolan, 2019:12):

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesenjangan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

2. Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada

tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dari keluarganya secara layak.

3. Prinsip Keswastandayaan atau Kemandirian

Prinsip keswastandayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bias berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip (Handini dkk, 2019:43):

1. Mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Karena melalui "mengerjakan" mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
2. Akibat, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang atau tidak-senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan di masa-masa mendatang;
3. Asosiasi, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan kegiatannya dengan kegiatan yang lainnya.

2.2.4. Falsafah Pemberdayaan Masyarakat

Kata falsafah adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani falsafah adalah *Philosophia*, *philos* artinya cinta, senang dan *sophia* artinya pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Falsafah dalam bahasa Yunani berarti *love of wisdom*, cinta akan kebijaksanaan yaitu menunjukkan suatu harapan atau kemajuan untuk mencari fakta dan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Falsafah berarti cinta

pada kebijaksanaan yaitu ingin mengetahui secara mendalam dan mendasar tentang kebenaran suatu hal, yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki terhadap suatu hal yang dipikirkan. Jadi makna falsafah adalah merupakan pandangan hidup dalam melakukan suatu hal yang telah diyakini kebenarannya untuk mencapai hasil yang lebih baik (Hamid, 2018:15).

Selanjutnya dikembalikan Falsafah bagi seorang aparat atau agen pemberdayaan masyarakat dalam memberdayakan sumber daya manusia dapat menganut pada falsafah pendidikan yang dianut oleh pahlawan nasional bidang pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu (Hamid, 2018:15):

1. *Hing ngarsa sung tulada* (beradadi depan) artinya, mampu memberikan contoh atau telada bagi masyarakat/kelompok sasaran;
2. *Hing madya mangun karsa* (berada di tengah) artinya, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba
3. *Tut wuri handayani* (berada di belakang) artinya, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat kelompok sasarnya, sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang ada, untuk mewujudkan tujuan perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut.

Dalam era demokratis saat ini, setiap aparat/agen pemberdayaan masyarakat hendaknya berperan sebagai seorang fasilitator yang menerapkan falsafah pemberdayaan melalui pendekatan yang manusiawi, seperti:

1. Menjadikan masyarakat/kelompok sasaran sebagai mitra sejajar, atau biasa diistilahkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi
2. Menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala keluhan dan kritikan masyarakat
3. Tidak menunjukkan sikap lebih tahu atau mengetahui segalanya dan terkesan ingin menggurui
4. Tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak sehingga terlihat ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu tahapan kegiatan, tanpa memperhatikan situasi sekitarnya apakah masyarakat sudah paham atau masih ada yang bermuka bingung
5. Menguasai materi yang diberikan tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat dan melakukan pengulangan-pengulangan setiap tahap kegiatan sampai mereka dapat melakukannya sendiri.
6. Tidak berfikir bahwa hal yang utama ada pada kesuksesan hasil akhir suatu kegiatan, tetapi justru pada setiap tahapan atau proses kegiatan mulai dari awal (identifikasi masalah), perencanaan, pembagian tugas (organizing), pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dan monitoring, seluruhnya

dapat dilaksanakan, diikuti dan dipahami oleh masyarakat/ kelompok sasaran secara partisipatif.

2.2.5. Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektifitas. Tidak menutup kemungkinan bahwa strategi pemberdayaan secara individual. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu (Sofinisa dkk, 2020);

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuannya adalah membimbing atau melatih seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap seseorang agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut sebagai Strategi Sistem Besar, karena dalam perubahan ini mempunyai sasaran yang mengarah kepada sistem lingkungan yang lebih luas.

Adanya perumusan kebijakan yang terkait, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial yang telah dilakukan, lobbying, pengorganisasian yang ada di dalam masyarakat serta manajemen konflik ini merupakan inti dari strategi dalam pendekatan. Strategi Sistem Besar memandang seseorang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.2.6. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain (Amsyal dkk, 2020):

1. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang di anggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut (Lesnussa, 2019):

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

2.3. Temuan Penelitian Terkait

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggali beberapa informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. Untuk mengetahui perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penulis dan Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hidayatullah, A., Fatmawati., & Muhiddin, A. (2022)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat diantaranya: (a) untuk anggaran dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa dengan baik dan efektif, (b) memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar diseluruh desa yang kurang memiliki modal usaha dan, (c) mengalokasikan sebagian dana desa untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa berupa barang seperti bibit tani, kain

No	Penulis dan Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				tenundan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan.
2	Setyawati, L.H.A., Kusuma, L.I., & Dewi, W.M (2022)	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Potensi Desa, Dan Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif	Potensi desa dan kinerja pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap pemberdayaan masyarakat tetapi alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya alokasi dana desa, potensi desa dan kinerja pemerintah desa berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat hal ini terbukti dimana $F_{hitung} (34.279) > F_{tabel} (2,704)$ dengan probabilitas 0,000.
3	Permatasari, E., Sopanah., & Hasan, K (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya

No	Penulis dan Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa.
4	Amsyal, R., Fitri, D.C., & Farma, J (2020)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD, Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
5	Labasi, H.A (2018)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan	Metode penelitian deskriptif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana ADD di Desa Tongko belum sesuai dengan ketentuan

No	Penulis dan Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso		Undang-Undang yang berlaku. Dalam pengelolaan dana ADD di Desa Tongko pemerintah lebih mengutamakan dana untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dibandingkan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
6	Sekenil, M & Heluka, E. (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo	Metode yang digunakan berupa kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa besar pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan percepatan pembangunan kampung, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi dari kepala kampung kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan masih kurang baik efektif, dimana penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat terselesaikan terindividu

No	Penulis dan Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dikarenakan kurangnya transparansi kepala kampung kepada masyarakat, pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses masih belum kurang baik.
7	Fisabililah, N.F.F., Nisaq, R.A., & Nurrahmawati, S (2020)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dengan menekankan partisipasi masyarakat sebagai kuncinya melalui peran Stakeholder agar program yang direncanakan bisa berjalan efektif.

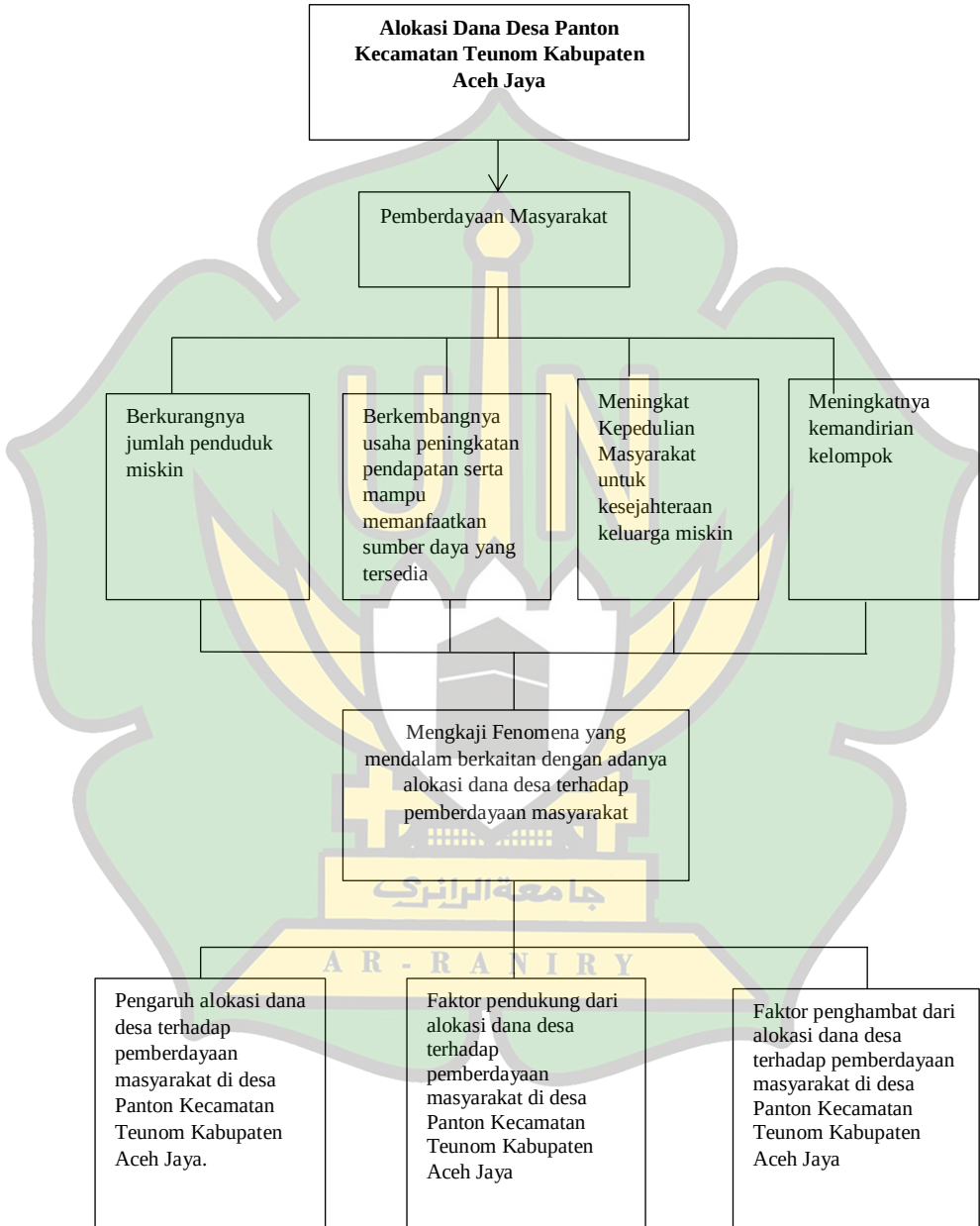
Sumber: Hasil Analisis Jurnal (2022)

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa penelitian terkait ini terdapat perbedaan dan persamaannya. Hasil analisis diperoleh bahwa persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan variabel yang sama yaitu menggunakan variabel bebas alokasi dana desa dan variabel terikat pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya terdapat pada tambahan variabel bebas Potensi desa, dan kinerja pemerintah dan variabel terikat pemberdayaan masyarakat.

2.4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan dengan teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kerangka teoritis yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 menyatakan bahwa dalam sebuah rancangan penelitian, adanya sebuah kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian atau model yang digunakan dalam penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian berlangsung. Kerangka penelitian dalam penelitian ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa yang ada di Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Alokasi Dana desa dapat mempengaruhi adanya pemberdayaan masyarakat. Adanya pengaruh alokasi dana desa dipengaruhi oleh peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui adanya dana desa terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Artinya, peranan alokasi dana desa yang ada di Desa Pantom mampu menanggulangi kemiskinan di desa tersebut. Penyediaan dana memberikan peluang kerja bagi masyarakat seperti memberikan modal usaha, bibit-bibit, hewan ternak dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat ditinjau dari berkembangnya usaha dalam meningkatkan pendapatan serta mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pemberian modal usaha, bibit-bibit tanaman, dan hewan ternak, masyarakat mampu mengembangkan usahanya dengan baik, sehingga tetap produktif.

Pemberdayaan masyarakat juga dipengaruhi dengan adanya kepedulian masyarakat untuk kesejahteraan keluarga miskin. Hal ini diperlukan sebuah dukungan dari masyarakat lainnya yang dianggap mampu untuk mendukung pihak aparat desa memberikan bantuan pada masyarakat kurang mampu seperti pemberian modal usaha, bibit-bibit padi atau jagung, dan sebagainya. Setelah adanya pemberian modal usaha atau lainnya, maka masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dengan adanya alokasi dana desa ini, maka peneliti ingin menggali informasi lebih dalam lagi berkaitan dengan pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat beserta faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, dan memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi (Margono, 2000:41). Pendekatan penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan logika hipotetiko verifikatif. Pendekatan tersebut dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan (Sugiyono, 2018:11).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, dimana peneliti mengkaji permasalahan yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari proses wawancara secara langsung dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Aparatur desa tentang data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

3.3. Informan Penelitian

Raco (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu masalah. Istilah sampel juga dikenal sebagai subjek dan objek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran dari suatu kasus penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria dan alasan tertentu diantaranya:

1. Dikarenakan jumlah penduduk di Desa Panton Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mencapai 481 jiwa, maka informan dalam penelitian ini diambil secara random pada masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

2. Informan yang akan dilakukan wawancara merupakan informan yang betul-betul terlibat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa seperti aparat desa terdiri dari kechik (kepala desa), tuha peut, sekretaris, dan bendahara.

3. Informan yang dipilih juga 5 orang masyarakat setempat

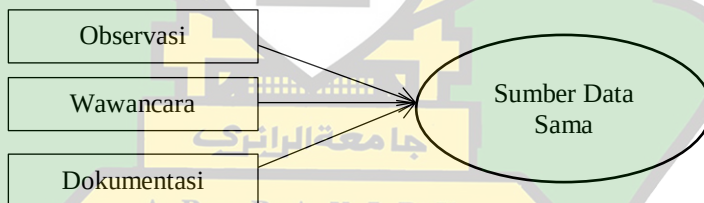
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti mampu mendeskripsikan masalah yang diteliti secara akurat dan mencari suatu keterangan tentang pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, maka peneliti menetapkan informan di sini (Aparat desa, dan masyarakat) agar mendapatkan data yang mendalam serta menghindari terjadi informasi yang tumpah-tindih. Kriteria masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari ketua pemuda beserta jajarannya yang ikut terlibat langsung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta usia masyarakat terdiri dari 37-50. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kechik (Kepala Desa)	1
2	Tuha Peut	2
3	Sekretaris	1
4	Bendahara	1
5	Masyarakat	5
Jumlah		10

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi sumber data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:308). Teknik pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan triangulasi. Dalam hal ini triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Triangulasi Data (Sugiyono, 2010)

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra (Arikunto, 2010:47). Jadi, observasi dalam penelitian ini adalah melihat atau mengamati

secara langsung apa saja *impact* dari adanya dana alokasi desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini terdiri dari aparatur desa dan lima orang masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman & Akbar, 2014:69). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian yang terdiri dari data-data tentang program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

3.5. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun teknik analisis datanya terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari alokasi dana desa terhadap pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada ke empat responden tersebut dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian terdapat dari hasil wawancara yang dinarasikan dari beberapa kalimat.
3. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang. Tahap terakhir adalah

menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari hasil wawancara yang telah disajikan dalam data dan disusun dengan rinci.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Panton pada mulanya sebelum terjadi suatu wilayah gampong adalah suatu hamparan yang datar ditumbuhi pohon-pohon kayu yang sangat besar-besar, diantaranya pohon kayu beringin, kayu sapeung, pohon kayu sikrong, dan pohon kayu tingkeum. Pada waktu itu gampong Panton masih bernama 'Panton Makmur' dan mempunyai wilayah yang masih luas termasuk gampong Pasi Tulakbala masih menjadi wilayah gampong Panton. Pada masa itu wilayah gampong Panton makmur berbatasan sebelah Timur dengan Suak Sapeung, sebelah dengan gampong Alue Ambang dan dipimpin oleh Geutjhik Nyak Arad An Waki Ajad. Maka pada masa kepemimpinan Geutjhik Idris sekitar tahun 1964 Panton Makmur berubah menjadi gampong Pantan yang termasuk dalam wilayah Keude Teunom.

Sistem pemerintahan tersebut pada pola adat/ kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong ini di pimpin oleh seorang Geutjhik dan di bantu oleh Satu orang wakil Geutjhik, karena pada saat itu belum ada istilah Ketua Dusun, kaur dan sebagainya wakil Geutjhik pada saat itu mempunyai peran dan fungsi yang sama seperti halnya kepala Dusun yang sekarang, di sini Imum Mukim mempunyai peranan yang kuat dalam tatanan pemerintahan

Gampong yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah keputusan Hukum Adat. Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong atau berwewenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong memantau kinerja dan kebijakan yang di ambil oleh Geutjhik, Imum Meunasah berperan mengorganisasikan Kegiatan-kegiatan Keagamaan. Urutan pemimpin pemerintahan gampong Panton menurut informasi para tokoh masyarakat sejak mula pertama gampong Panton menjadi suatu wilayah gampong sampai dengan tahun 2014.

Tabel 4.1
Urutan Sejarah Kepemimpinan Pemerintahan
Gampong Panton

NO	NAMA GEUTJHIK	PERIODE PEMERINTAHAN
1.	Geutjhik Nyak Ara	1947 – 1951
2.	Geutjhik Musa	1951 - 1955
3.	Geutjhik Harun	1955 - 1958
4.	Geutjhik Puteh	1958 - 1962
5.	Geutjhik Harun	1962 - 1964
6.	Geutjhik Idris	1964 - 1969
7.	Geutjhik Abdullah	1969 - 1972
8.	Geutjhik Nurdin	1972 - 1980
9.	Geutjhik Salihin	1980 - 1989
10.	Geutjhik Zakaria Usman	1989 - 1995
11.	Geutjhik Pjs.Sidik Imham	1995 - 1997
12.	Geutjhik Syamsuddin AR	1997 - 2005
13.	Geutjhik Abdul Muis	2005 - 2007
14.	Geutjhik Anwar Husen	2007 - 2013
15.	Geutjhik Toni Fauzan	2013 – 2016
16.	Geutjhik Abdul Muis	2016 – 2019
17.	Keuchik Drs. M. Zubir Daud	2019 s/d Sekarang

Sumber: Dokumentasi Data Desa Panton (2022)

Pelaksanaan pembangunan sangat minim dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1977, walaupun ada pembangunan yang skala sangat kecil dan itu pun berasal dari swadaya masyarakat. Baru dari periode tahun 2005 mulai adanya pembangunan yang signifikan yaitu setelah musibah Tsunami karena banyaknya donator asing yg membantu. Untuk melihat tingkat pembangunan Gampong Panton dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Sejarah Pembangunan Gampong Panton

No	Jenis Kegiatan Pembangunan/Pengadaan	Periode	Sumber Dana	Volume	Ket
1.	Pembangunan Mesjid	1972	Swadaya	1 Unit	H
2.	Pembangunan Rumah Muslimat	1968	Swadaya	1 Unit	H
3.	Pembangunan Kantor Desa	1972	Swadaya	1 Unit	H
4.	Pembangunan Sekolah Mtsn	2002	PEMDA	1 Unit	H
5.	Pembangunan Sekolah MAN	1985	PEMDA	1 Unit	H
6.	Jembatan Leung Cadek	1989	Swadaya	1 Unit	H
7.	Kantor PLN	1990	PEMDA	1 Unit	H
8.	Rumah Hakim	1990	PEMDA	1 Unit	H
9.	Kantor Hakim	1990	PEMDA	1 Unit	H
10.	Kantor Pos	1984	PEMDA	1 Unit	H
11.	Jalan Lueng Cadek	1991	Swadaya	750 m	H
12.	Jln.Umong Lhee Sagoou	1991	Swadaya	1 Unit	H
13.	Lumbung Desa	1990	Swadaya	1 Unit	H
14.	Balee Istirahat	1991	Swadaya	1 Unit	H
15.	Pintu Gerbang (Gapura)	1991	Swadaya	1 Unit	H
16.	Pembangunan PDAM	1991	PEMDA	1 unit	H
17.	Kantor Bank Bri	1992	Swadaya	1 Unit	H
18.	Pembangunan Pesantren	1997	Swadaya	1 Unit	H
19.	Pembangunan Pagar Kuburan	1998	Swadaya	1unit	H

20.	Pembangunan Balai Kuburan	1998	Swadaya	1 Unit	H
21.	Pos Jaga	1999	Swadaya	1 Unit	H
22.	Pagar Meunasah	1999	Swadaya	1 Unit	H
23.	Lapangan Volley Ball	1999	Swadaya	1 Unit	H
24.	MCK Meunasah	2006	OPPUK	2 Unit	
25.	Mck Umum	2006	ACF	2 Unit	
26.	Pembangunan Toko Desa	2006	PPK	1 Unit	
27.	Pembangunan Kantor Desa	2007	AIPRD	1 Unit	
28.	Rumah Sementara	2006	IDES		
29.	Balai Pemuda	2006	IDES	1 unit	
30.	Rumah Aman/Kedai Desa	2007	BRCS	2 pintu	
31.	Rumah Permanen	2007	BRCS		
32.	Balai Musyawarah	2007	Child Fund	1 Unit	
33.	Pagar Kuburan	2007	Pemda	1 Unit	
34.	Kantor Pos	2007	Pemda	1 Unit	
35.	Pesantren	2007	Swadaya	1 Unit	
36.	Balai Kuburan	2007	Swadaya	1 Unit	
37.	Saluran Air Persawahan	2007	DRC	1700 m	
38.	Rehab Meunasah	2007	IOM	1 Unit	
39.	Jalan Aspal Desa	2007	BRR	1000 m	
40.	Riol/Drainase	2008	Pemda	150 m	
41.	Jalan Beton Setapak	2008	Pemda		
42.	Kantor/Gedung Pln	2008	BRR	1 Unit	
43.	Pagar Meunasah	2008	Pemda/Sw adaya	1 Unit	
44.	Gedung MAN	2008	AAG	1 Unit	
45.	Gedung Mtsn	2008	UNICEF	1 Unit	
46.	Gedung MIN	2008	UNICEF	1 Unit	
47.	Pos Jaga	2008	Swadaya	1 Unit	
48.	Lapangan Volly Ball	2008	Swadaya	1 Unit	
49.	Pembangunan Pasar Desa	2009	BKPG	1 Unit	
50.	Pasar Desa	2010	BKPG	1 Paket	
51.	Pembanguunan Talud	2011	BKPG	161 m	
52.	Pembangunan Pukesdes	2011	APBA	1 Unit	
53.	Jembatan Lung Cadek	2012	PNPM	1 Unit	
54.	Pembangunan Talud	2012	BKPG		
55.	Pembangunan Talud	2012	BKPG	88 m	
56.	Penimbunan Jalan Lung Cadek	2014	APBK	850 m	
57.	Pembangunan Talud	2014	BKPG	43 m	
58.	Pembangunan Reol	2014	APBK	1000 m	
59.	Pembangunan Pagar Paud	2014	BKPG	1 Unit	

60.	Pembangunan Kedai Desa	2014	BKPG	1 Unit	
61.	Pembangunan Bronjong Lung Cadek	2014	ADG	20 m	
62.	Pembangunan Tempat Wudhu Meunasah	2015	APBK	1 Unit	
63.	Pembangunan Brojong Lung Cadek	2015	DD	52 m	
64.	Pembangunan Saluran Beton	2015	ADG	138 m	
65.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2015	ADG	95 m	
66.	Rehab Toko Desa	2015	ADG	1 Unit	
67.	Lanjutan Pembangunan Tempat Wudhu Meunasah	2015	APBA	1 Unit	
68.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2016	DD	3 x 35 m	
69.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2016	DD	2,30 x 45 m	
70.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2016	DD	2 x 50 m	
71.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2016	DD	2,20 x 95 m	
72.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	2016	DD	1,70 x 55 m	
73.	Pembangunan Saluran Tanah	2016	DD	50 m	
74.	Rehab Kedai Desa	2016	DD	4 x 12 m	
75.	Pembangunan Pintu Gerbang/Gapura	2016	DD	2 x 5 m	
76.	Pembangunan Septick Tank	2016	DD	3 x 6 m	
77.	Pengadaan Hand Traktor	2016	DD	2 Unit	
78.	Pengadaan Mesin Perontok Padi	2016	DD	1 Unit	
79.	Pengadaan Alat Pelaminan	2016	DD	1 Paket	
80.	Pengadaan Meja Makan Kanduri	2016	DD	12 Unit	
81.	Pengadaan Pentas Bongkar Pasang	2016	DD	1 Unit	
82.	Pembangnan Tugu Batas Besa	2017	DD	2 Unit	
83.	Pembangunan Gudang Aset Desa	2017	DD	1 Unit	

84.	Rehab Toko Desa	2017	DD	2 Unit	
85.	Pembangunan Toko Desa	2017	DD	1 Unit	
86.	Pembangunann Septick Tank, Kanopi & Sumur Bor Toko Desa	2017	DD	1 Paket	
87.	Pembangunan Lapangan Bola Volly	2018	DD	13,30 x 31,20 m	
89.	Pembangunan saluran Drainase dan Plat Beton	2018	DD	1 Paket	
90.	Pembangunan Gedung Pkk	2018	DD	3 unit	
91.	Pembangunan Plat Dacker Saluran dan Box kontrol	2018	DD	1 paket	
92.	Pembangunan Rabat Beton	2018	DD	1 paket	
93.	Pembangunan Tutup Saluran Beton	2019	DD	77 m	
94.	Pembangunan Jembatan Kayu & Gorong	2019	DD	1 Paket	
95.	Rehap rumah Layak Huni	2019	DD	17 Unit	
96.	Rehap TPA	2019	DD	4 Unit	
97.	Pagar Stenlis	2019	Silva	17 m	
98.	Pembangunan Rabat Bahu jalan	2019	DD	1.168 m	
99.	Pembangunan Rabat Beton	2019	DD	60 m	
100.	Pembangunan Gedung Paud	2020	DD	1 Unit	
101.	Pembelian Ruko	2020	DD	1 Unit	
102.	Pengadaan Kendaraan Bermotor	2020	Silva	1 Unit	

Sumber: Dokumentasi Data Desa Pantan (2022)

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga langkah diantaranya; observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian atau hasil penelitian seakurat mungkin dari subjek atau informan yang akan dilakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan maupun lokasi penelitian. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui; (a) pengaruh alokasi dana desa

terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya; (b) apa saja faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan; (c) apa saja faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Penelitian ini fokus pada dana desa dan pembangunan desa. Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang benar-benar mengetahui tentang keadaan, situasi dan masalah yang akan diteliti. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Informan Penelitian

No	Informan	Pekerjaan
1	Drs M. Zubir Daud	Geuchik (kepala desa)
2	Masrul	Sekretaris Desa
3	Hazia Wasalwa	Bendahara
4	Drs Murni	Tuha Peut
5	Zuniar	Tuha Peut
6	Rival Zulvi	Masyarakat
7	Misbahul Hadi	Masyarakat
8	Efendi	Masyarakat
9	Nelia	Masyarakat
10	Sulaiman	Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Data Desa Panton (2022)

4.2.1. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah adalah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari APBN sebesar 25% atau dana perimbangan yang disalurkan ke daerah yang disebut dana alokasi umum. Kabupaten kemudian memberikan 10% kepada desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini membuktikan bahwa alokasi dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kemajuan desa tersebut. Salah satunya melalui proses pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan kehidupan masyarakat. Berikut ini merupakan salah satu bentuk-bentuk alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 4.4
Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Pemberdayaan	Tahun
1	Pembangunan tutup saluran buton	2019-2020
2	Pembangunan jembatan kayu dan gorong-gorong	2019-2021
3	Rehap rumah layak huni pada beberapa rumah saja	2019-2020
4	Rehap TPA	2020
5	Rehap Gedung PAUD	2020-2021

6	Pembelian Ruko	2020-2022
7	Ketersedian benih atau bibit jagung	2020-2022
8	Pembagian benih padi	2020-2022
9	Pembagian hewan ternak seperti sapi	2020-2022
10	Pembangunan tempat pembenihan sayuran	2020
11	Kegiatan menjahit kasap dan sulam emas	2020-2022
12	Membuat kerajinan lokal Aceh	2020-2022
13	Biaya Covid	2020-2022

Sumber: Dokumentasi Data Desa Pantan (2022)

Tabel 4.4 menunjukkan alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Pantan Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan tahun anggaran 2020 sampai 2022 anggaran alokasi dana desa diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat seperti menyediakan bibit jagung, benih padi, pembagian hewan ternak dan sebagainya. Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat maka dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya; (a) berkurangnya jumlah penduduk miskin, (b) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, (c) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya dan, (d) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Alokasi dana desa merupakan sebuah anggaran yang diberikan pada setiap daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya alokasi dana desa yang diberikan di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Alokasi dana desa selama ini rata-rata sudah mampu memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan. Jenis pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Zubir Daud selaku Geuchik (Kepala Desa) mengatakan bahwa alokasi dana desa yang diberikan selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Salah satunya terlihat dari beberapa program pembangunan yang belum direalisasikan seperti pembangunan toko dan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini dikarenakan alokasi dana desa sebelumnya dialihkan ke dana Covid dari tahun 2020 sampai 2022. Akan tetapi, alokasi dana desa sebenarnya secara keseluruhan sudah mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2019 seperti pembangunan tutup saluran beton, pembangunan jembatan kayu dan gorong, rehap rumah layak huni pada beberapa rumah saja, rehap TPA, pagar stenlis, pembangunan rabat bahu jalan,

pembangunan rabat beton, pembangunan gedung PAUD, pembelian ruko, dan pengadaan kendaraan bermotor. Beberapa kegiatan pembangunan yang telah direalisasikan mampu meningkatkan pemberdayaan, apalagi sebagian alokasi dana desa sejak tahun 2020 sampai 2022 telah difokuskan sebagian ke dana Covid. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Daud selaku Geuchik (kepala desa) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Alokasi dana desa sebenarnya sejak tahun 2020 sampai 2022 ini belum mampu merealisasikan secara keseluruhan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan toko dan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, ada beberapa program yang dapat direalisasikan sejak tiga tahun terakhir diantaranya; pembangunan tutup saluran beton, pembangunan jembatan kayu dan gorong, rehap rumah layak huni pada beberapa rumah saja, rehap TPA, pagar stenlis, pembangunan rabat bahu jalan, pembangunan rabat beton, pembangunan gedung PAUD, pembelian ruko, dan pengadaan kendaraan bermotor. Beberapa program yang belum dapat memberdayakan masyarakat karena alokasi dana desa sekarang ini sejak tahun 2020 smpai 2022 lebih difokuskan ke dana Covid” (Drs. M. Daud, Geuchik/Kepala Desa, Pantan, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan Bapak Masrul selaku Sekretaris Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa alokasi dana desa sudah terpenuhi sebanyak 75% seperti adanya pembentukan jembatan dan gorong-gorong. Selain itu, alokasi dana desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti membantu ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pembuatan jembatan untuk bisa

dilalui agar terciptanya transportasi antar gampong, karena jembatan ini sebagai penghubung antar gampong sebelah. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Masrul selaku Sekretaris desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Alokasi dana desa sudah memnuhi pemberdayaan masyarakat sekitar 75% seperti adanya pembentukan jembatan, serta gorong-gorong. Alokasi dana desa juga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, karena dapat membantu ekonomi masyarakat. Pembuatan jembatan juga bertujuan agar dapat terhubung dengan gampong sebelah” (Masrul, Sekretaris Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan bapak Murni selaku Tuha Peut desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa alokasi dana desa belum memenuhi kebutuhan masyarakat seutuhnya. Alokasi dana desa tentu dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat namun kadangkala pihak pemerintahan menyalahgunakan dana tersebut, sehingga banyak pembangunan belum dapat terlaksana sesuai dengan target atau sasaran yang telah disepakati. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan keluarga, dapat meningkatkan kebutuhan desa. Bentuk pemberdayaan yang diterima masyarakat dilakukan secara berkelompok dan perorangan. Pembangunan yang terdapat di desa Panton melalui dana desa adanya pembangunan ruko dan lain sebagainya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Murni selaku Tuha Peut desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Alokasi dana desa selama ini belum seutuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kadangkala alokasi dana desa pihak pemerintahan menyalahgunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya imcam keluarga serta meningkatkan kebutuhan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat selama ini dapat dilakukan secara berkelompok dan perorangan serta adanya pembangunan seperti pembangunan ruko”(Murni Tuha Peut, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan Bapak Rival Zulvi selaku masyarakat desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa alokasi dana desa sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Alokasi dana desa juga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran di desa tersebut. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang paling utama oleh dampak ekonomi masyarakat semakin membaik, karena terciptanya lapangan kerja. Bentuk pemberdayaan yang diterima dari alokasi dana desa seperti pembangunan, pendidikan, dan sosial. Contoh pemberdayaan perempuan atau pembentukan PKK dan lain sebagainya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rival Zulvi selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya alokasi dana desa selama ini belum memenuhi secara keseluruhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Namun, tada beberapa kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa sehingga dapat memberdayakan masyarakat pada umumnya. Oleh karena

itu, dengan adanya dana desa dapat mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk pengangguran yang diterima masyarakat dengan adanya alokasi dana desa seperti pembangunan, pendidikan dan sosial” (Rival Zulvi, Masyarakat, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka berkurangnya tingkat kemiskinan di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya terlihat dari adanya beberapa pembangunan yang dapat membantu masyarakat dalam mencari nafkah. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sudah mampu terealisasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan dampak pembangunan yang ada di desa tersebut. Beberapa bentuk pembangunan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti sejak tahun 2019 sudah adanya pembangunan tutup saluran beton, pembangunan jembatan kayu dan gorong, rehap rumah layak huni, rehap TPA, pagar stenlis, pembangunan rabat bahu jalan, pembangunan rabat beton, pembangunan gedung PAUD, pembelian ruko, dan pengadaan kendaraan bermotor. Akan tetapi, masih terdapat beberapa pembangunan yang belum terealisasi seutuhnya seperti pembangunan toko dan rumah layak huni.

Pemberdayaan masyarakat dapat membantu perekonomian karena dapat menciptakan sebuah lapangan kerja. Pemberdayaan dilakukan secara berkelompok dan perorangan. Untuk memberdayakan masyarakat pihak aparat desa mampu membuka

lapangan kerja bagi masyarakat dengan membuat tempat penanaman bibit sayur-sayuran, membuat kasab, serta memberikan pembagian bibit jagung dan padi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathony dkk (2019) bahwa alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat seperti motivasi, program, dan peranan pemerintah dan lain sebagainya. Dengan demikian Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Pemberdayaan Masyarakat, artinya semakin tepat penggunaan ADD maka akan semakin baik Pemberdayaan Masyarakat demikian pula sebaliknya.

2. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan yang Dilakukan oleh Penduduk Miskin dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia

Peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pantan Kecamatan Teunom kabupaten Aceh Jaya juga dipengaruhi oleh adanya alokasi dana desa. Salah satunya melalui adanya usaha berupa lapangan kerja yang diberikan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Salah satunya dengan memberikan modal usaha pada masyarakat yang membutuhkan serta berbagai jenis pembangunan yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah. Hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Zubir selaku kepala desa mengatakan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa pembangunan

yang sudah dapat membantu dalam kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari untuk menjalankan pekerjaannya seperti adanya pembangunan tutup saluran beton yang bertujuan agar air tidak mudah meluap ke sekitaran rumah warga sekitar, kemudian pembangunan jembatan kayu dan gorong yang bertujuan agar dapat diakses masyarakat untuk menyebranginya, adanya rehap TPA bertujuan agar memberikan kenyamanan bagi anak-anak di desa tersebut dalam menimba ilmu pengetahuan Agama dengan fasilitas yang layak. Selain itu, pembangunan rabat bahu jalan bertujuan untuk memperluas jalan, sehingga rabat bahu jalan dapat difungsikan bagi pengendara kendaraan roda dua dan penjalan kaki. Pembangunan rabat beton bertujuan untuk pembangunan rumah karena memudahkan proses pembuatan cor bangunan, sebagai landasan, sebagai proses pengerjaan konstruksi berjalan lebih cepat, dan meluruskan permukaan tanah. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Daud selaku Geuchik (kepala desa) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan hasilnya dari beberapa pembangunan yang dapat diakses masyarakat di desa tersebut. Beberapa pembangunan diantaranya; adanya pembangunan tutup beton saluran agar air saluran tidak mudah meluap, pembangunan jembatan kayu agar memudahkan masyarakat dalam menyebranginya, kemudian rehap TPA agar memiliki tempat layak huni bagi anak-anak TPA, adanya rabat bahu jalan agar memudahkan akses bagi masyarakat berkendara dua serta pembangunan rabat beton untuk membangun rumah layak

huni bagi masyarakat” (Drs. M. Daud, Geuchik/Kepala Desa, Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya).

Bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya dapat dilihat dari ketersediaannya benih jagung, benih padi, bibit ternak, dan modal usaha yang diberikan. Selain itu, beberapa jenis pembangunan-pembangunan lainnya seperti pembangunan tempat pembenihan sayur-sayuran. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Daud selaku Geuchik (kepala desa) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Selama ini bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat dilihat dari adanya ketersediaan beberapa benih jagung, padi serta bibit ternak dan modal usaha. Hal ini akan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui kegiatan tani dan memelihara hewan ternak. Selain itu, jenis pembangunan lainnya yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan menyediakan pembangunan tempat pembenihan sayur-sayuran yang dapat meningkatkan pola kerja masyarakat dalam kehidupan kesehariannya” (Drs. M. Daud, Geuchik/Kepala Desa, Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan Ibu Hazia Wasalwa selaku Bendahara Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa dengan adanya alokasi dana desa secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2022 alokasi dana desa lebih difokuskan pada pelatihan-pelatihan, sehingga tidak menguntungkan kepada masyarakat seutuhnya tetapi fokus ke aparatur desa. Selain itu, adanya dana desa juga dapat mempengaruhi pemberdayaan

masyarakat yang dilihat dari beberapa hal diantaranya; terwujudnya ADM pada masyarakat, terbentuknya kualitas pada aparatur desa. Bentuk pemberdayaan masyarakat diantaranya; pemberian modal usaha UKM, serta penanaman pangan pada tahun 2020, kemudian menyediakan pembibitan jagung dan pembagian sapi pada tahun 2022. Pembangunan-pembangunan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya; pembangunan tempat pembibitan sayuran tahun 2020, pembangunan gedung PAUD tahun 2021, kemudian yang berlanjut sekarang ini pembibitan jagung serta pengadaan sapi. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Hazia Wasalwa selaku Bendahara dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Alokasi dana desa selama ini belum terpenuhi dengan merata, karena sejak tahun 2022 ini lebih difokuskan pelatihan-pelatihan, sehingga hanya menguntungkan bagi aparatur desa bukan masyarakat. Selain itu, alokasi dana desa juga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar seperti terwujudnya ADM, terbentuknya kualitas aparatur desa. Bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya juga dapat dilihat dari pemberian modal usaha UKM, penanaman pangan tahun 2020, menyediakan pembibitan jagung dan pembagian sapi tahun 2022. Selain pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang dihasilkan seperti pembangunan tempat pembibitan sayuran sejak tahun 2020, pembangunan gedung PAUD sejak tahun 2021” (Hazia Wasalwa, Bendahara Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh alokasi dana desa selama ini juga

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya seperti terwujudnya administrasi pada masyarakat serta terbentuknya kualitas pada aparatur desa. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa diantaranya; memberikan modal usaha UKM, penanaman pangan, menyediakan pembibitan jagung serta pembagian sapi. Pembangunan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti tempat pembibitan sayuran dan pembangunan gedung PAUD. Selain itu, pengaruh dana desa juga dapat dilihat dari adanya sistem pemberdayaan seperti adanya pembentukan jembatan dan gorong-gorong. Hal ini membuktikan salah satu bentuk berkembangnya usaha masyarakat dipengaruhi oleh adanya dana desa dengan memberikan modal usaha dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dapat membuktikan bahwa peranan alokasi dana desa mampu memberikan perkembangan usaha bagi masyarakat yang kurang mampu.

3. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Lingkungannya

Alokasi dana desa juga mampu meningkatkan kerjasama masyarakat di Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Salah satu kepedulian masyarakat lain dengan memberikan akses bagi pihak aparat desa untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan seperti adanya pemberian bibit jagung, membuka lahan penanaman

sayuran, serta memberikan modal usaha. Hasil wawancara dengan Ibu Zuniar selaku Tuha Peut Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa adanya alokasi dana desa belum memenuhi seutuhnya kebutuhan masyarakat.. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari adanya peluang kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga menghindari pengangguran yang tinggi. Bentuk pemberdayaan yang diterima masyarakat dengan adanya alokasi dana desa yaitu adanya kegiatan menjahit kasab atau sulam emas, membuat kerajinan lokal Aceh. Selain itu, jenis pembangunan seperti sudah adanya PAUD, jalan sudah mulai diperbaiki. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Zuniar selaku Tuha Peut desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Adanya alokasi dana desa selama ini belum memenuhi secara utuh kebutuhan masyarakat. Adanya dana desa memang sudah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pengaruh alokasi dana desa juga dapat mengurangi pengangguran karena menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat seperti terciptanya sebuah peluang kerja bagi masyarakat seperti menjahit kasab atau sulam emas atau membuat kerajinan lokal Aceh lainnya. Kemudian jenis pembangunan selama ini seperti adanya PAUD dan perbaikan jalan”(Zuniar Tuha Peut, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan Bapak Misbahul Hadi selaku masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa alokasi dana desa dapat memberdayakan masyarakat seperti terciptanya tempat penanaman bibit sayur-

sayuran, membuat kasab, serta adanya pembagian bibit jagung dan padi. Hal ini mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan pemberdayaannya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Misbahul Hadi selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Bagi saya alokasi dana desa selama ini belum seutuhnya mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan adanya dana desa tersebut. Apalagi pada beberapa tahun sebelumnya dana desa dapat memberdayakan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja seperti adanya tempat penanaman bibit sayuran, membuat kasab, adanya pembagian bibit jagung serta padi” (Misbahul Hadi, Masyarakat, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi selaku masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa alokasi dana desa selama ini sudah ada beberapa kegiatan yang direalisasikan sehingga dapat memberdayakan masyarakat. Selain itu, beberapa pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diantaranya; memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, memudahkan masyarakat dalam beraktivitas melalui adanya pembangunan serta memberikan beberapa kemudahan lainnya. Bentuk pemberdayaan yang diterima masyarakat dengan adanya alokasi dana desa seperti adanya tempat penanaman bibit sayuran, terciptanya kerja kelompok seperti membuat kasab, adanya pembagian hewan ternak, memberikan modal UKM dan lain sebagainya. Adapun

hasil wawancara dengan Bapak Efendi selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Alokasi dana desa selama ini belum seutuhnya mampu memadai kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan yang sudah direalisasikan seperti terciptanya sebuah lapangan kerja, memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dengan adanya pembangunan serta memberikan beberapa kemudahan lainnya. Bentuk pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat seperti terciptanya tempat penanaman bibit sayuran, terciptanya kerja kelompok seperti emmbuat kasab, adanya pembagian jewan ternak serta adanya pemberian modal usaha” (Efendi, Masyarakat, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan memberikan dukungan pada aparat untuk menciptakan lapangan kerja beserta pemberian modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini terlihat dengan adanya alokasi desa masyarakat desa Panton sudah mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini juga terlihat dari berbagai kebutuhan masyarakat yang sudah dibangun seperti jembatan-jembatan sebagai akses untuk memudahkan masyarakat untuk ke sawah dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu proses yang perlu diperhatikan dari pihak pusat dan daerah serta persetujuan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat pihak pusat serta daerah harus memperhatikan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan dan

diperlukan masyarakat agar terhindar dari pengangguran sehingga dapat menstabilkan perekonomian seperti mensejahterakan UMKM. Hal ini bertujuan agar mampu menjamin kehidupannya masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tanan & Fonataba (2022) bahwa pengelolaan ADD perlu terus dikelola dengan baik sehingga benar-benar dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk peningkatan usaha-usaha di masyarakat seperti peningkatan hasil pertanian, peternakan, peningkatan usaha kios, warung atau rumah makan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

4. Meningkatnya Kemandirian Kelompok yang Ditandai dengan Makin Berkembangnya Usaha Produktif Anggota dan Kelompok, Makin Kuatnya Permodalan Kelompok, Makin Rapinya Sistem Administrasi Kelompok, Serta Makin Luasnya Interaksi Kelompok dengan Kelompok Lain di dalam Masyarakat.

Alokasi dana desa mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya terlihat dari perkembangan usahanya setelah diberikan modal usaha, mengurangi tingkat pengangguran dengan bekerja secara rutin ke sawah setelah adanya pemberian bibit jagung dan benih padi. Selain itu, semakin banyaknya ternak dimiliki masyarakat setelah pembagian hewan ternak dan sebagainya. Hasil wawancara dengan aparat desa Bapak Drs. M. Zubir Daud selaku Geuchik (Kepala Desa) mengatakan bahwa dengan adanya alokasi dana desa mampu meningkatkan kemandirian masyarakat, dimana dengan

adanya pemberian modal usaha masyarakat mampu mengembangkannya secara perlahan-lahan, kemudian dengan adanya bibit jangung dan benih padi masyarakat sudah memperoleh hasil dari kegiatan tersebut dan sebagainya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Daud selaku Geuchik (kepala desa) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Ya, setelah adanya alokasi dana desa ini mampu meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat setelah diberikan modal usaha maka usahanya semakin berkembang secara perlahan, kemudian dengan pemberian bibit padi dan jangung masyarakat sudah memperoleh hasilnya dan sebagainya” Drs. M. Daud, Geuchik/Kepala Desa, Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya).

Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa peningkatan kemandirian pada masyarakat sudah mampu terealisasi dengan baik. Pemberdayaan masyarakat terlihat dari peranan alokasi dana desa tersebut. Salah satunya dengan memberikan modal usaha, serta pembagian hewan ternak dan adanya berbagai macam pembangunan yang sudah dapat diakses masyarakat. Adapun hasil wawancaranya dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya peningkatan kemandirian dalam masyarakat setelah adanya alokasi dana desa seperti sudah tidak ada lagi pengangguran. Hal ini dikarenakan adanya pemberian modal usaha, dan pembagian hewan ternak dan berbagai macam program pembangunan yang dapat memudahkan masyarakat”.(Sulaiman, Masyarakat, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa peningkatan kemandirian kelompok yang dimaksud merupakan tingkat pemberdayaan masyarakat setelah adanya alokasi dana desa. Peningkatan kemandirian terlihat dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang telah terealisasi seperti; menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah disepakati bersama. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diharapkan aparat desa bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, baik itu dalam perencanaan, penganggaran, mekanisme pencairan dan penyaluran, pengawasan, serta pertanggungjawaban ADD (Ardiansyah dkk, 2022). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Actor yang menyebutkan bahwa masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya (Maani, 2011). Hal membuktikan bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka pihak aparat desa maupun pemerintah pusat harus mengedepankan segala ide-ide atau keputusan masyarakat agar terealisasi sesuai dengan keinginan bersama.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya menjadi salah satu pusat perhatian pihak pemerintah, karena setiap daerah sudah memiliki dana desa yang dipusatkan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaannya pihak pemerintah pusat serta daerah harus mampu mengkondisikan sesuai dengan target yang akan dicapai. Selain itu, dalam proses pemberdayaan ini masyarakat harus mempunyai eksistensi penting untuk menjalankannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan dana desa ini salah satu manfaat yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dari proses yang diimplementasikan. Salah satu prosesnya untuk memberikan kemudahan bagi semua masyarakat dalam menjalankan berbagai program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu target capaian yang diterima masyarakat dari dana desa yang diterimanya. Oleh karena itu, pihak pemerintah harus mampu menggunakan dana tersebut sebaik mungkin agar dapat terlaksana semua program yang disusun secara bersama melalui proses kemufakatan agar dapat menjalankan program dengan benar. Pihak pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama agar tidak saling menyalahkan satu sama lain, ketika proses yang direncanakan tidak sesuai target atau harapan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa jenis pemberdayaan masyarakat melalui adanya dana desa.

Tabel 4.5
Dana Desa dan Pemberdayaan

No	Jenis Pemberdayaan Masyarakat
1	Pembedayaan perencanaan program, menanggulangi pengangguran
2	Pemberdayaan masyarakat pada proses pembangunan, menciptakan lapangan kerja masyarakat seperti membagikan hewan ternak, bibit jagung maupun bibit padi serta pemberian modal usaha
3	Pemberdayaan masyarakat pembangunan tempat untuk pembibitan sayuran serta menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu yang ada di desa seperti sulam kasap dan sebagainya.
4	Pemberdayaan masyarakat dengan membangun rumah layak huni
5	Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan perehapan TPA
6	Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan rabat bahu jalan dan beton
7	Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan PAUD
8	Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan modal usaha bagi UKM
9	Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan jembatan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

i. Faktor Pendukung dari Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Alokasi dana desa ini memiliki berbagai faktor pendukung yang dapat melancarkan atau menjalankan proses pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat memfasilitasi perilaku individu atau kelompok dalam

meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Berikut ini merupakan hasil beberapa wawancara dengan beberapa aparat desa beserta masyarakat.

Hasil wawancara pertama dengan Bapak Drs. M. Daud selaku Geuchik atau kepala desa gampong Pantan Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa dapat menyediakan lahan dalam bercocok tanam, menyediakan sumbangan ke masyarakat, adanya kemauan masyarakat dalam berpartisipasi. Selanjutnya perubahan yang terjadi dengan adanya alokasi dana desa diantaranya; dapat meningkatkan motivasi kerja masyarakat untuk menambah penghasilan. Namun, alokasi dana desa yang disediakan belum mampu memenuhi segala pemberdayaan masyarakat seutuhnya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Daud selaku Geuchik (kepala desa) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat seperti adanya kesediaan lahan dalam bercocok tanam, menyediakan sumbangan untuk masyarakat, serta kemauan masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, perubahan yang terjadi dengan adanya alokasi dana desa dapat dilihat dari adanya motivasi kerja masyarakat untuk menambah penghasilan”(Drs. M. Daud, Geuchik/Kepala Desa, Pantan, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya).

Hasil wawancara kedua dengan Ibu Hazia Wasalwa selaku Bendahara Desa Pantan Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya

mengatakan bahwa faktor pendukung tersedianya alokasi dana desa secara keseluruhan lebih memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 lebih pada pelatihan-pelatihan aparatur, pelatihan sigap, pelatihan komputer, dan pelatihan ke Bandung. Perubahan yang terjadi dengan adanya dana desa dapat mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi di desa tersebut, karena banyak kegiatan dalam pembibitan jagung dan lain sebagainya. Namun, secara keseluruhan belum memenuhi pemberdayaan masyarakat seutuhnya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Hazia Wasalwa selaku Bendahara dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa terlihat dari pemberdayaan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 ini alokasi dana desa lebih memfokuskan pada kegiatan pelatihan aparatur, pelatihan sigap, pelatihan komputer dan pelatihan ke bandung. Selain itu, perubahan yang terjadi setelah adanya alokasi dana desa terlihat dari berkurangnya jumlah pengangguran karena adanya ketersediaan kegiatan pembibitan jagung dan sebagainya (Hazia Wasalwa, Bendahara Desa Pantom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).”

Hasil wawancara ketiga dengan Bapak Masrul selaku Sekretaris Desa Pantom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa seperti membuat jembatan untuk masyarakat. Selain itu, perubahan yang terjadi dengan adanya alokasi dana desa seperti perbaikan jalan dan lain sebagainya. Namun, sejak pandemi Covid-

19 maka alokasi dana desa hanya 50% memenuhi pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Masrul selaku Sekretaris desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung dengan adanya alokasi dana seperti dapat membuat jembatan di masyarakat. Selain itu terdapat beberapa perubahan sejak adanya alokasi dana desa seperti perbaikan jalan dan adanya jembatan. Meskipun demikian sejak pandemi Covid-19 maka alokasi dana desa hanya 50% yang dapat memenuhi pemberdayaan masyarakat”(Masrul, Bendahara Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara keempat dengan Bapak Murni selaku Tuha Peut Desa Panton, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung yang paling utama dari masyarakat itu sendiri dan pendamping desa. Perubahan yang terjadi dengan adanya dana desa maka desa adanya sebuah biaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila dilihat secara keseluruhan maka dana desa seutuhnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selayaknya tetapi dengan adanya dana desa maka apa saja yang berkaitan dengan berbagai akses seperti dalam bidang apapun tidak ada kendala lagi. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Murni selaku Tuha Peut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung dengan adanya dana desa selama ini yang paling utama dukungan dari pihak masyarakat, serta pendamping desa. Perubahan yang terjadi dengan adanya alokasi dana desa dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat karena adanya alokasi dana desa. Namun, apabila dilihat secara keseluruhan alokasi dana desa

memang belum seutuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat” (Murni, Tuha Peut, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kelima dengan Ibu Zuniar selaku Tuha Peut Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan disebut sebagai cash power. Alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat belum seutuhnya terealisasi. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Zuniar selaku Tuha Peut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan peluang kerja seperti adanya kegiatan-kegiatan dengan sebutan cash power. Selain itu, alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat belum terealisasi secara seutuhnya.” (Zuniar, Tuha Peut, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara keenam dengan Bapak Rival Zulvi selaku masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat selama ini terlihat dari dukungan pembiayaan dana desa bagi aparatur desa dalam rangka memberdayakan masyarakat. Akan tetapi sejak tahun 2022 alokasi dana desa sudah tidak difokuskan pada pemberdayaan masyarakat atau pembangunan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah tingkat Kabupaten meminta pihak aparatur desa untuk

mengadakan pelatihan-pelatihan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rival Zulvi dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa selama ini dapat dilihat dari penggunaan dana desa untuk memberdayakan kehidupan masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 dana desa tidak difokuskan pada pemberdayaan masyarakat tetapi untuk kegiatan pelatihan aparatur desa” (Rival Zulvi, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara ketujuh dengan Bapak Misbahul Hadi mengatakan bahwa faktor pendukung dari adanya alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya; beberapa tahun yang lalu alokasi dana desa mampu mendengarkan tujuan dan maksud masyarakat. Namun, sejak covid sebagian dana diberikan sebagai dana covid. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Misbahul Hadi dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa memang bertujuan untuk memberdayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pihak aparatur desa mampu mendengarkan keluhan kesah masyarakat. Akan tetapi sejak adanya covid-19 sebagian dana diberikan sebagai dana covid” (Misbahul Hadi, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kedelapan dengan Bapak Efendi selaku masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dari adanya alokasi dana desa dalam memberdayakan kehidupan masyarakat yang paling utama dari dukungan masyarakat itu sendiri. Hal ini akan mendorong dalam keterlaksanaan beberapa program dalam desa tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Efendi dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya faktor pendukung dari alokasi dana desa dalam memberdayakan kehidupan masyarakat pada umumnya yang paling utama dalam dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat memiliki dukungan maka dapat mendorong keterlaksanaan beberapa program yang telah direncanakan di desa tersebut” (Efendi, Masyarakat, Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kesembilan dengan Ibu Nelia selaku masyarakat desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa selama ini yang paling utama dukungan dari masyarakat kemudian dari pihak pemerintah dalam menyetujuinya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nelia dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa dalam memberdayakan masyarakat yang paling utama dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian diiringi oleh pihak pemerintah baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam menyetujuinya” (Nelia, Masyarakat, Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kesepuluh dengan Bapak Sulaiman selaku masyarakat desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor pendukung dalam keterlaksanaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat biasanya yang paling utama memerlukan dukungan masyarakat. Aliran alokasi dana desa seutuhnya harus diketahui secara terbuka oleh kalangan

masyarakat setempat. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Bagi saya faktor pendukung dalam keterlaksanaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang paling utama memerlukan dukungan masyarakat itu sendiri. Selain itu, aliran dana desa seutuhnya harus terbuka dengan semua kalangan masyarakat. Hal ini akan memberikan kepercayaan penuh atas semua pengeluaran dari dana desa”. (Sulaiman, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat dan aparatur desa, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya; menyediakan lahan dalam bercocok tanam, menyediakan dana untuk dibagikan kepada masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor pendukung lainnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya komunikasi dan keserjasama antara aparatur desa dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansyur dkk (2022) bahwa faktor pendukung disebabkan oleh adanya dukungan dari masyarakat, kerjasama antara masyarakat dan aparat desa, dan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi sampai ikut langsung ke lapangan.

Selain itu, alokasi dana desa sebenarnya belum seutuhnya dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, karena sejak covid-19 alokasi dana desa sebagiannya dipergunakan untuk

mensejahterakan masyarakat dalam menghadapi covid-19 selama hampir 3 tahun. Sejak tahun 2022 alokasi dana desa selama ini lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan pelatihan aparatur desa sehingga masyarakat menganggap sejak tahun 2022 setiap pembangunan beserta pemberdayaan lainnya belum mampu terealisasi dengan baik.

Berdasarkan faktor pendukung dalam pengelolaan dana terhadap pemberdayaan masyarakat, maka dalam teori sistem sosial salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang atau massa. Apabila kelompok tersebut memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya (Patilaiya dkk, 2022). Hal ini membuktikan bahwa dalam sebuah desa tertentu memerlukan sebuah kerjasama agar dapat mempertahankan dan menjalankannya sesuai dengan perencanaan agar mudah tercapai dengan baik.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan berkaitan dengan faktor pendukung dengan adanya alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai dukungan serta saling kerjasama antara pemerintah pusat, daerah beserta masyarakat dalam melaksanakan programnya. Perbandingan yang terlihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Hal ini dikarenakan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa yang paling

utama memiliki sikap saling terbuka antara pihak aparat desa dengan masyarakat setempat agar terhindar dari peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan.

Faktor pendukung yang perlu ditanamkan sampai saat ini adalah kerjasama yang baik antara kedua belah pihak sehingga saling mengetahui semua alokasi dana desa yang digunakan sebagai proses pemberdayaan yang dirasakan masyarakat setempat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan partisipasi masyarakat atau antusiasnya dalam melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Sofinisa dkk (2020) bahwa pemberdayaan adalah pemberi wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian etonomi kejawaran bawah. Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparatur atau birokrat bagi pelaksanaan tugas yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan.

Faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui dana desa ini mampu memberikan gambaran penting terhadap kemajuan suatu daerah serta mampu memberdayakan dengan memudahkan segala kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menjadi salah satu keutamaan yang akan menjamin kemajuan daerah tersebut. Selain itu, faktor pendukung ini mampu memberikan

suatu solusi bagi masyarakat untuk menemukan berbagai pencerahan terhadap segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pihak pemerintah pusat, aparatur desa harus mampu bekerjasama dalam menjalankan suatu program yang telah direncanakan. Berikut ini merupakan beberapa faktor pendukung yang dapat melancarkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

No	Faktor Pendukung
1	Adanya ketersediaan lahan dalam bercocok tanam
2	Menyediakan dana untuk dibagikan kepada masyarakat
3	Aadanya partisipasi masyarakat
4	Adanya komunikasi dan keserjasama antara aparatur desa dengan masyarakat
5	Mampu memberikan gambaran penting terhadap kemajuan suatu daerah serta mampu memberdayakan dengan memudahkan segala kebutuhan ma

Sumber: Hasil wawancara dan observasi di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

ii. Faktor Penghambat dari Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Faktor penghambat merupakan salah satu faktor yang menghambat terjadinya proses pembangunan dalam rangka memberdayakan kehidupan masyarakat sekitar. Faktor penghambat dengan adanya alokasi dana desa terhadap pemberdayaan

masyarakat dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan aparat desa beserta masyarakat berikut ini:

Hasil wawancara pertama dengan Bapak Drs. M. Daud selaku Geuchik atau kepala desa gampong Panton Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambat dari adanya alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya tersedia SDM dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang program-program pemerintah. Kendala dengan adanya alokasi dana desa adalah terbatasnya alokasi dana desa yang dapat dialokasikan untuk diberikan ke masyarakat, serta sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan dari masyarakat, kemudian sering terjadinya banjir yang dapat merusak tanaman. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs M. Daud selaku Geuchik (kepala desa) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Penghambat adanya alokasi desa terhadap pemberdayaan masyarakat terlihat dari kurangnya ketersediaan SDM dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Selain itu, beberapa kendala dengan adanya alokasi dana desa adalah terbatasnya alokasi dana yang dialokasikan ke masyarakat, sering terjadinya banjir sehingga merusak tanaman” (Drs. M. Daud, Geuchik/Kepala Desa, Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya).

Hasil wawancara kedua dengan Ibu Hazia Wasalwa selaku Bendahara Desa Panton Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama ini terlihat dari ketika memberikan pendapat banyak yang tidak diterima oleh pihak pemerintahan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah lebih

memfokuskan atau memberikan arahan pada pihak pemerintah untuk dana pelatihan-pelatihan tidak fokus pada pembangunan atau pemberdayaan masyarakat lainnya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Hazia Wasalwa selaku Bendahara dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa diantaranya; sejak tahun 2022 dana desa hanya memfokuskan pada pelatihan-pelatihan, karena tidak memfokuskan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat lainnya” (Hazia Wasalwa, Bendahara Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara ketiga dengan Bapak Masrul selaku Sekretaris desa Pantan Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambat dengan adanya alokasi dana desa (ADD) masih minimnya dana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Masrul selaku Sekretaris desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Beberapa faktor penghambat dari alokasi dana desa adalah minimnya dana yang diberikan, sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hambatan dari adanya alokasi dana desa saat ini karena di tahun 2022 dana lebih dominan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan” (Masrul, Sekretaris Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara keempat dengan Bapak Murni selaku Tuha Peut Desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

mengatakan bahwa faktor penghambat dalam alokasi dana desa biasanya tidak disesuaikan dengan keputusan pihak keperluan masyarakat desa tetapi sudah ditentukan langsung program-program oleh pihak pemerintah Kabupaten, sehingga terlihat dari tahun ini belum ada pembangunan yang dapat direalisasikan secara langsung. Kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat terletak pada masyarakat itu sendiri, dimana ketika diberikan modal usaha tidak dikembalikan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Murni selaku Tuha Peut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dengan adanya alokasi dana desa biasanya tidak disesuaikan dengan keperluan masyarakat tetapi pihak kabupaten telah menentukan program-program sendiri. Hal ini akan menghambat semua pembangunan yang telah direncanakan oleh pihak masyarakat dan aparat desa setempat”(Murni Tuha Peut Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kelima dengan Ibu Zuniar selaku Tuha Peut Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambatnya saat itu, karena adanya covid-19 maka alokasi dana desa lebih fokus kepengalokasian tersebut. Hambatan lainnyadengan adanya alokasi dana desa terletak pada kurangnya pembangunan yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Zuniar selaku Tuha Peut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat saat ini sejak adanya covid-19 alokasi dana desa sudah difokuskan ke pembiayaan covid, sehingga banyak program-program pemberdayaan serta program pembangunan yang belum terealisasikan dengan baik.

Rendahnya alokasi dana desa ini tidak dapat memberdayakan masyarakat seutuhnya” (Zuniar, Tuha Peut Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara keenam dengan Bapak Rival Zulvi selaku masyarakat desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambat dalam keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat terletak pada alokasi dana desa yang setiap tahunnya belum mampu merealisasikan semua program yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan hambatan tersebut disebabkan oleh pihak Kabupaten lebih mendorong program yang direncanakan dibandingkan menyetujui dari program yang telah disepakati bersama aparat desa dengan masyarakat desa tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rival Zulvi selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya faktor penghambat dalam keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat biasanya alokasi dana desa setiap tahunnya belum mampu merealisasikan program yang telah direncanakan. Hal ini biasanya dipengaruhi tidak adanya persetujuan dari pihak Kabupaten karena lebih memfokuskan pada program yang direncanakan Kabupaten tersebut” (Rival Zulvi, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara ketujuh dengan Bapak Misbahul Hadi selaku masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambat ketidakterlaksanaan pemberdayaan masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi sebagian masyarakat

melalui program yang sedang dijalankan. Selain itu, faktor penghambat lainnya, biasanya terletak pada beberapa kendala diantaranya dana yang diberikan tidak mencukupi semua program yang telah direncanakan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Misbahul Hadi selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui adanya alokasi dana desa biasanya dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi sebagian masyarakat. Selain itu, faktor penghambat lainnya, kurangnya ketersediaan dana untuk memenuhi beberapa program yang telah direncanakan” (Misbahul Hadi , Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kedelapan dengan Bapak Efendi selaku masyarakat Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambat ketidakterlaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan alokasi dana desa biasanya dipengaruhi oleh banyak program yang direncanakan tidak terlaksana dengan baik karena kekurangan anggaran. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Efendi selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya selama ini salah satu faktor yang dapat menghambat ketidakterlaksanaan pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana desa biasanya kurangnya ketersediaan anggaran. Hal ini akan mempengaruhi terhadap jalannya sebuah program yang telah direncanakan sebelumnya” (Efendi, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kesembilan dengan Ibu Nelia selaku masyarakat Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa faktor penghambat dalam keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui adanya alokasi dana desa biasanya kurang tepatnya penggunaan dana dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat. Apalagi sejak tahun 2022 ini semua program tidak membawa pemberdayaan pada masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nelia selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya faktor penghambat dalam keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat selama ini masih kurang tepat di beberapa bidang. Salah satu faktor penghambat dalam keterlaksanaannya seperti masih banyaknya program yang belum direalisasikan. Apalagi sejak tahun 2022 semua program tidak untuk memberdayakan masyarakat tetapi untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang dianjurkan pihak pemerintah tingkat kabupaten” (Nelia, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Hasil wawancara kesepuluh dengan Bapak Sulaiman mengatakan bahwa faktor penghambat dari adanya alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat biasanya disebabkan oleh kurangnya ketercukupan dana untuk menjalankan semua program yang telah direncanakan. Selain itu, penghambat lainnya juga dapat dipengaruhi oleh beberapa program yang belum mampu memberdayakan masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku masyarakat desa Panton dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya alokasi dana desa yang disediakan selama ini belum mampu secara keseluruhan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan alokasi dana desa yang tersedia belum mampu menjalankan semua program yang telah direncanakan sebelumnya” (Sulaiman, Masyarakat, Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, maka faktor penghambat dari adanya alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kurang ketersediaan SDM yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang program-program yang diajukan pemerintah. Kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh kesulitan dalam memasarkan produk serta sering terjadinya banjir maka kegiatan bercocok tanam dapat terhambat. Hambatan yang paling menurunkan tingkat pemberdayaan masyarakat karena kurangnya ketersediaan alokasi dana desa yang mencukupi. Selain itu, hambatannya juga disebabkan oleh sebagian dana lebih difokuskan pada pendanaan covid. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansyur (2022) bahwa penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya pandemi covid 19 serta adanya perbedaan pendapat. Menurut Hulu dkk (2018) faktor penghambat pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada di desa tersebut belum memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat atau

keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan sukarela dari proses perencanaan sampai evaluasi dari program tersebut.

Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui adanya dana desa terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan suatu program yang direncanakan. Hal ini akan berdampak pada kesalahpahaman kedepannya apabila tidak dijalankan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari faktor hambatan tersebut, maka pihak pemerintah pusat, pihak aparat desa beserta masyarakat harus memiliki sikap saling terbuka serta kerjasama yang baik. Agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan biasanya terjadi perbedaan hanya pada lokasi penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak dapat dibandingkan secara signifikan. Hal ini dikarenakan faktor penghambat biasanya terletak pada kurangnya kerjasama antar pihak-pihak terkait, serta kurangnya rasa empati dan mementingkan kebutuhan masyarakat dalam proses infrastruktur dan sebagainya. Secara umum, faktor penghambat yang paling dominan sejak tiga tahun terakhir disebabkan oleh adanya covid-19 yang melanda Indonesia sehingga berdampak ke seluruh penjuru daerah-daerah, maka proses pembangunan serta pemberdayaan lainnya hanya memfokuskan pada penanggulangan

covid-19. Hal ini menyebabkan alokasi dana desa harus diutamakan pada covid-19 dibandingkan proses pemberdayaan masyarakat pada bidang lain secara keseluruhan. Berikut ini merupakan beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui adanya dana desa.

Tabel 4.7
Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

No	Faktor Penghambat
1	Kurang ketersediaan SDM yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat setempat
2	Kesulitan dalam memasarkan produk serta sering terjadinya banjir maka kegiatan bercocok tanam dapat terhambat
3	Kurangnya ketersediaan alokasi dana desa yang mencukupi
4	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan suatu program yang direncanakan
5	Dana desa terhambat untuk pembangunan karena difokuskan untuk covid-19

Sumber: Hasil wawancara dan observasi di Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat dari berbagai pembangunan yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat seperti pembangunan tutup saluran beton, pembangunan jembatan kayu dan gorong, rehap rumah layak huni, rehap TPA, pagar stenlis, pembangunan rabat bahu jalan, pembangunan rabat beton, dan pembangunan gedung PAUD. Pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat seperti memberikan modal usaha pada UKM, penanaman pangan, menyediakan pembibitan jagung, pembagian sapi dan tempat pembibitan sayuran.
2. Faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya menyediakan lahan dalam bercocok tanam, menyediakan dana untuk dibagikan kepada masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Alokasi dana desa sebenarnya belum seutuhnya dapat meningkatkan pemberdayaan

masyarakat, karena sejak covid-19 alokasi dana desa sebagiannya dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam menghadapi covid-19 selama hampir tiga tahun. Sejak tahun 2022 alokasi dana desa selama ini lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan pelatihan aparatur desa sehingga masyarakat menganggap sejak tahun 2022 setiap pembangunan beserta pemberdayaan lainnya belum mampu terealisasi dengan baik.

3. Faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dipengaruhi oleh kurang ketersediaan SDM yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat setempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang program-program yang diajukan pemerintah, kesulitan dalam memasarkan produk serta sering terjadinya banjir maka kegiatan bercocok tanam.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kedepannya pihak pemerintah pusat dapat merealisasikan anggaran alokasi dana desa sesuai dengan pengajuan pihak aparat desa setempat, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan perencanaan.

2. Diharapkan kedepannya harus adanya keterbukan dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat setempat agar anggaran alokasi dana desa dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan beserta harapan bersama.
3. Diharapkan kedepannya, pihak aparat desa mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat untuk menghindari pengangguran yang ada sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amsyal, R., Fitri, D.C., & Farma, J. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Ekonomii dan Bisnis Syariah*, 4(1):11-27.
- Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3):377-387.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Bawono, R.I. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fairus, A. (2019). *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*. Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah.
- Hamid, A.M., Widyastuti, A., Firdaus, E., Chamdah, D., Tanjung, R., Sari, N.R., Musyadad, F.N., Karwanto., Kato, I., Cecep, H., & Purba, S. (2021). *Pengelolaan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hamid, I. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Handini, S., Sukei., & Astuti, K.H. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Helawana & Herlina. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Jnal JISIPOL*, 6(1):49-69.

- Heridiansyah, J. (2012). Pengaruh *Advertising* terhadap Pembentukan *Brand Awareness* serta Dampaknya pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Pedas ABC (Studi Kasus pada Konsumen PENGGUNA Kecap Pedas ABC di Kota Semarang). *Jurnal STIE Semarang*, 4(2):53-73.
- Hulu, Y., Harahap, H.R., & Nasution, A.M. (2018). Pengelolaan Dan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(1):146-154.
- Irmansyah., Mustafa, W.S., & Hamid, S.R. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2):1086-1095.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4):597-602.
- Kehik, S.B. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 3(1): 4-6.
- Maani, , D.K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1): 53-65.
- Mansyur, J., Suyitno, I., Akbal, M. (2022). Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Phinisi Integration Review*, 5(1): 182-192.
- Margayaningsih, I.D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Publiciana*, 9(1):1-33.
- Margono. (2000). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Maryani, D., & Nainggolan, E.R.R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta:UIP.
- Noviyanti & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(1):73-88.
- Patilaiya, L.H., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiya, S., Supriatna, A., Harto, B., Urhuhe, Siburian, D., Mahaza., Maesarini, W.I., & Hapsari, D.T. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Putra, E.P. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*. 5(1): 1-14.
- Putra, K.C., Pratiwi, N.R., & Suwondo, (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singorasi Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Public (JAP)*, 1(6): 1-8.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Raharjo, M.M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmawati, D.Y., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3):189-202.

- Ritongga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *REGION: Jurnal Pengembangan Wlayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2):277-290.
- Rorong, G.J., Senduk, A.V., & Kambey, N.A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akutansi Manado*, 1(1):84-87.
- Rudiarta, G.K.I., Arthayana, W.I., & Suryani, P.L. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1):63-67.
- Samadara, S., Eugenia, J., & Tanan, H.P. 2020. Implementation of Village Fund Financial Management in Supporting Development and Empowerment Rural Communities. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 544:1-4.
- Sari, N.R., Rbawanto, H., & Said, M. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11):1880-1885.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Umiyah, I., Gan, A.J.A., & Mindarti, I.L. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(5):890-899.

Usman, H & Akbar, S. (2014). *Pengantar Statistika* Jakarta: Bumi Aksara.

Yusrizal. (2016). *Pengukuran & Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*. Yogyakarta: Pale Media Prima.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.



Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2022/2023


UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1677/UIN.08/FEB/PP.00.9/9/2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca sarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Menunjuk Saudara :

- a. Dr. Hafes Furgani, M.Ec
- b. Yulindawati, SE, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Susanti

N I M : 180504005

J u d u l : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Pantion Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 September 2021
D e k a n,

Zaki Fuadi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

AR - RANIRY

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2678/Un.08/FEBLI/T1.00/09/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUSANTI / 180604005**
Semester/jurusan : IX / Ilmu Ekonomi
Alamat sekarang : Jeulingke, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 September 2022
an. Delan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Desember
2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari
Kechik Desa Panton, Kecamatan Teunom,
Kabupaten Aceh Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN TEUNOM
KEUCHIK GAMPONG PANTON
Jalan Banda Aceh - Meulaboh Km. 261 Kode Pos : 23653

Nomor : 344/2004/SRP/X/2022 Pantan, 13 Oktober 2022
Lampiran :- Kepada :
Perihal : Surat Balasan Penelitian YTH. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Dengan Hormat,
Menindak lanjuti surat dari Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2678/Un.08/FEB.1/Tl.00/09/2022 berkenaan dengan permohonan penelitian ilmiah mahasiswa. Maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : SUSANTI
NPM : 180604005
Jur/Fak : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Pantan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya).

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pantan, 13 Oktober 2022
Keuchik Gampong Pantan

Drs. M. ZUBIR DAUD

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

PERTANYAAN PENELITIAN (WAWANCARA)

Tujuan 1: Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

1. Apakah alokasi dana desa yang diberikan sudah mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apakah dengan adanya alokasi dana desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
4. Apa saja bentuk pemberdayaan yang diterima masyarakat dengan adanya alokasi dana desa tersebut?
5. Apa saja pembangunan-pembangunan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?

Tujuan 2: Untuk mengetahui faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

1. Apa saja faktor pendukung dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja perubahan yang terjadi dengan adanya alokasi dana desa di desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
3. Apakah alokasi dana desa yang disediakan mampu memenuhi segala pemberdayaan masyarakat di desa Panton Kecamatan

Teunom Kabupaten Aceh Jaya?

Tujuan 3: Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

1. Apa saja faktor penghambat dari alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?



Lampiran 5: Daftar Nama-Nama yang Diteliti

No	Informan	Pekerjaan
1	Drs M. Zubir Daud	Geuchik (kepala sekolah)
2	Masrul	Sekretaris Desa
3	Hazia Wasalwa	Bendahara
4	Drs Murni	Tuha Peut
5	Zuniar	Tuha Peut
6	Rival Zulvi	Masyarakat
7	Misbahul Hadi	Masyarakat
8	Efendi	Masyarakat
9	Nelia	Masyarakat
10	Sulaiman	Masyarakat



Lampiran 6: Foto Dokumentasi



Wawancara Kechik (Kepala Desa)



Wawancara Bendahara



Wawancara Sekretaris



Wawancara Tuha Peut



Wawancara Tuha Peut



Wawancara Masyarakat



Wawancara Masyarakat



Wawancara Masyarakat



Wawancara Masyarakat



Wawancara Masyarakat

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama : Susanti
TTL : Panton, 09 Mai 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Status : Belum Menikah
No Hp : 085362802960
Alamat : Dusun Makmur, Desa Panton, Kec
Teunom, Kab Aceh Jaya

Orang Tua

- a. Ayah : Effendi
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dusun Makmur, Desa Panton, Kec
Teunom, Kab Aceh Jaya
- b. Ibu : Elly Novida
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Makmur, Desa Panton, Kec
Teunom, Kab Aceh Jaya

Pendidikan

- a. SD/MI : MIN Teunom Tamat Tahun 2012
b. SLTP : MTSN Teunom Tamat Tahun 2015
c. SLTA : SMA 1 Teunom Tamat Tahun 2018
d. PT : S1 Ilmu Ekonomi Uin Ar-Raniry Banda
Aceh sampai sekarang